

PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Desi Amalia

Abstrak : *Pro dan kontra pernikahan dini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, sebahagian memandang pernikahan dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Diantara mudharat dari pernikahan dini ini ialah: tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita) sehingga mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, buruknya kesehatan ibu dan anak karena factor gizi ibu kurang terpenuhi, timbulnya salah satu factor penyebab tindakan kekerasan terhadap isteri hal ini terjadi karena factor berfikir yang belum matang. Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi, ini merupakan suatu ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan.*

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Perkawinan Dini, Hukum Islam dan Undang-undang

PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Pernikahan dini akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan seiring dengan perubahan zaman globalisasi informasi saat ini mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korabnnya kaum muda. Pro dan kontra pun muncul terhadap maslah pernikahan dini ini. Pernikahan dini (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan dini ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu masih bias dilaksanakan seperti aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia atau umur seseorang melaksanakan akad nikah. Akan tetapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan

wanita mencapai 16 tahun hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.

Sampai saat ini pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional. Meskipun terkadang keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah factor yang terakhir ini orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Pernikahan di bawah umur dalam pandangan ulama hukum fiqh di masa lalu umumnya dianggap sah dan tidak dipermasalahkan statusnya. Pernikahan dini sudah eksis sekian lama selama berabad-abad tanpa ada yang menggugat keberadaannya. Namun kini, pernikahan di bawah umur dipertanyakan legalitas dan manfaatnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu pernikahan dan kata dini. Kata pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Sedangkan kata dini adalah kata sifat yang arti awalnya sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.¹ Menurut Muhammad Fauzhil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*, nampaknya pernikahan dini dengan pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahaan atau pernikahan dalam usia remaja.² jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11-24 tahun. Pendapat lain sebgaimana yang dikemukakan oleh Sri Rahayu Hadiotomo, usia muda/remaja secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir 21 tahun.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm 614

² Muhammad Fauzhil Azhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Prees) hlm IV, IX

³ Sri Rahayu Hadiotomo, *Psikologi Berkembang dan Bagian-bagiannya* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989), hlm 219

Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” menyebut perkawinan muda/kawin belia dengan istilah nikah *ash-shagir/ash-shagirah* kebalikannya adalah nikah *al-kabir/al-kabirah*. Sedangkan kitab-kitab fiqh baru menyebutnya dengan istilah *az-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini)⁴. Shagir/shagirah secara literal berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan ihtilam yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqh Syafi’i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga bias dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Abu hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan dan al-Syafi’i menyebut usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut diatas menurut term fiqh pernikahan dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Yang jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh dan dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah. Mengenai praktek pernikahan dini dalam Islam telah lama dilakukan baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah maupun oleh Rasulullah sendiri. Pernikahan diusia dini dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Siti ‘Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun. Yang kemudian beliau kumpul ketika usia 9 tahun. Hal ini terdapat pada hadits riwayat Bukhari

Artinya: *Disampaikan kepada kami (al-Bukhari) oleh ‘Ubaid ibn Isma’il, yang mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (yang bernama ‘Urwah) yang berkata, ‘Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu ‘A’isyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (sengan Nabi SAW.) tatkala ia berumur sembilan tahun.’*⁵

Hadits ini merupakan laporan tentang ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW. Oleh Hisyam (ibn ‘urwah ibn zubair ibn ‘awwam). Buyut khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq r.a. ibn ‘urwah adalah kakak ‘Aisyah yang bernama Asma. Keduanya putri Abu Bakar r.a. Mengenai kebenaran hadis ini para ahli hadis memberi pendapat diantaranya adalah ibn hajar dan adzhabi

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002) hlm 67

⁵ Shahih Bukhari jilid IV kitab “Manaqib Anshar, Bab Perkawinan no 3896 hlm 252

dimana mereka mengatakan bahwa riwayat hisyam ibn 'urwah 'Aisyah menikah dengan Nabi diusia 6 tahun dan kumpul dengan Nabi sebagai suami isteri di usia 9 tahun adalah lemah, karena hisyam tatkala menyampaikan peristiwa itu sudah pikun. Bahkan murid-muridnya (Imam Malik ibn Anas dan Abu Hanifah) Hisyam sendiri yang tinggal dimadinah tidak mengakui dan tidak mengutip riwayat-riwayat yang disampaikan Hisyam ketika berada di Iraq. Salah satunya adalah riwayat tentang pernikahan 'Aisyah dan Rasulullah SAW tersebut.

Dibagian lain Imam Bukhari juga melaporkan juga berita yang disampaikan Hisyam tentang penyerahan 'Aisyah kepada Nabi di madinah setelah tiga tahun pernikahan, yang dijelaskan dalam hadis yang artinya:

“Disampaikan kepada kami oleh Farwah ibn Abi Mighra’ dari ‘Ali ibn Manshur dari Hisyam, dari ayahnya dari ‘A’isyah r.a. yang berkata ‘Nabi SAW. menikahiku ketika aku adalah seorang anak berumur enam tahun’ Kami hijrah ke Madinah dan turun di rumah klan Harits ibn Khazaj. Aku demam, rambutku rontok dan terurai yang kemudian hari tumbuh lagi sampai ke pundak. Maka datanglah ibuku, Ummu Ruman, ketika aku berada dalam ayunan bersama sahabat-sahabatku. Ibuku berseru memanggilku dan aku mendatangnya tanpa mengetahui apa yang dikehendaknya dariku. Ia memegang tanganku sampai ia menghentikanku di depan pintu rumah. Aku tersengal-sengal. Kemudian ia mengambil air dan mengusap wajah dan kepalaku. Lalu ia memasukkanku kerumah. Dalam rumah terdapat kaum wanita Anshar yang berkata, mudah-mudahan Alla h memberi kebaikan, berkah dan keberuntungan. ‘Dan ia menyerahkanku kepada kaum wanita itu untuk mengatur urusanku. Tak disangka-sangka Rasulullah mendatangkiku pada pagi harinya. Ibuku menyerahkanku kepada Rasulullah. Umurku kala itu sembilan tahun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional juga mengatur tentang batasan usia menikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Mengenai batasan usia menikah ini terdapat pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Pasal tersebut dapat difahami bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita tentunya melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan konsekuansinya perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang, artinya menurut Negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada kecuali apabila perkawinan tersebut terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Islam.

Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat difahami bahwa batasan usia dalam pernikahan dini sangat variatif, ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun, sebagian berpendapat dibawah usia 17/18 tahun, yang lain berpendapat dibawah usia 20 tahun, serta ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dini yakni yakni pernikahan yang dilakukan dibawah usia 24 tahun. Namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termasuk pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

B. Batas Usia Minimal Dalam Pernikahan

Dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) tidak terdapat ketentuan secara ekspilist yang menetapkan batasan usia menikah. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini dalam persepektif fiqh adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan dibawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas fuqaha, dan dibawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.

Imam Malik menetapkan 17 tahun bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan baligh. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih dibawah usia 17 tahun dianggap sah kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan, demikian menurut Maliki. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun⁶. Begitu pulalahnya dalam fiqh Hanafi wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongkrit menyebut umur, hanya saja secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah baligh dan berakal sebagaimana keduanya juga menjadi syarat umum bagi operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan. Dalam hal ini madzhab Hanafi menetapkan usia baligh 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimal yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan alasan bahwa pada usia itu ada laki-laki ada yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil. Nampaknya mazhab Ja'fari juga menentukan criteria baligh dari batas minimal, menurut pendapat ini seorang sudah dipandang dewasa jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab ja'fari

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Basrie Prees, 1994) hlm 22-23

juga berpendang bahwa seorang boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Dalam hukum perkawinan, ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan hanya terdapat pada Inpers nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur berdasarkan ketetapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu menurut penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, nomor 4 huruf d, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh sebab itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan pasal 7 ayat (1) diatas tidak bersifat kaku, artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pada pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu seorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dalam UU perlindungan anak ini batas usia pernikahan adalah 18 tahun baik pria maupun wanita. Dari beberapa keterangan tadi dapat diambil benang merah bahwasanya upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang meyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.

Dalam menentukan usia minimal nikah, ternyata sangat merugikan kaum perempuan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa indikasi. *Pertama*, kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat disbanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. *Kedua*, dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) dalam keluarga sakinah mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga. *Ketiga*, usia nikah yang relative muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.⁷

Berbagai literatur kedokteran menyebutkan bahwa usia dewasa bagi anak pria dan wanita itu berbeda-beda sesuai dengan iklim yang terdapat di suatu daerah. di daerah-daerah atau negeri-negeri yang beriklim panas, kedewasaan akan segera nampak. sementara itu di daerah yang beriklim dingin kedewasaan akan nampak terlambat. sehingga kadang-kadang berbgi tanda kedewasaan seorang anak itu tidak nampak kecuali jika telah berumur 18 tahun. sebagaimana halnya juga haid, kadang-kadang juga dapat segera tiba pada keadaan-keadaan yang aneh dan jarang meski belum sampai umur 19 tahun.⁸

C. Pernikahan Dini Persepektif Ulama Fiqh (Fuqaha)

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim⁹. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandakan ketidak bolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh¹⁰.

⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta, el-Kahfi, 2008) hlm 180

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima.2004) hlm 30

⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 34.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6682.

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sebagai berikut: Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai khususiyah bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.

Imam Nawawi ra dalam *syarh sahih muslimnya* menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/*balighah* tidak ada *khiyar* untuk *fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I dan seluruh fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah *balighah*.

Sungguhpun para fuqaha klasik dan tengah pada umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha dan legislator di masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurangnya membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau menjalani.

Mayoritas besar ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda/ belia dalam istilah yang lebih populer perkawinan dibawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan criteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan. Beberapa argument yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

QS. At-Thalaq (4)

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

QS. An-Nur

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Namun lain halnya dengan Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti, mereka berbeda pandangan dengan mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Alas an yang digunakan ialah

QS. An-Nisa (6)

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Menurut mereka, jika anak-anak belia tersebut boleh dinikahkan sebelum baligh, maka apa jadinya artinya ayat ini selain itu mereka sebenarnya belum membutuhkan nikah. Ibnu Syubrumah mengatakan:

“Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”.

Mengenai kasus pernikahan siti ‘Aisyah dengan Nabi SAW, Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi SAW sendiri yang tidak bias diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumhur ulama fiqh, Ibnu Syurumah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia biisa mengiakt dan memaksa jika telah menjadi

pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ijma'*.

D. Pernikahan Dini dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Pernikahan dini ini masih dijumpai dinegara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai factor yang berhubungan dengan pernikahan di usia dini ini antara lain: pendidikan, ekonomi dan budaya. Dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini ini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan diusia remaja yang berdampak pada penolakan kehamilan. Di Indonesia, UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi, Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan setelah mendapat izin dari wali atau orang tuanya, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan 'celah' bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan

Seterusnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Sungguhpun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan oleh para pihak. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. KHI juga mengatur, perkawinan dapat dibatalkan antara lain dengan alasan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (*vide* pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh dan peraturan perundangan-undangan (*vide* pasal 73).

Di dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua ***diwajibkan*** melindungi anak dari perkawinan dini, namun amat disayangkan, pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak memuat sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Hal lain yang mendesak untuk dilakukan adalah perlunya menyeragamkan perundang-undangan yang ada dalam mendefinisikan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, dinamakan anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih dari itu yang paling mendasar adalah perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah *mindsight* masyarakat tentang nilai-nilai anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik. Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa prematur.

Dari paparan di atas, secara ringkas dapat disampaikan bahwa pernikahan dini atau anak-anak di Indonesia, berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 23 Tahun 2003 cenderung dibatasi dan dilarang (walau tidak tegas), namun pernikahan dini di bawah usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan masih dimungkinkan dengan jalan mengajukan izin dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat bagi yang beragama Islam.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten. di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan corang yag belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang 19 tahun maka perlu izin pengadilan. ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam. adapun posedur untuk mendapatkan dispensasi dimaksud dapat dilihat dalam perturan Meneteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pal 13 yang diatur sebagai berikut:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan
4. Salinan penetapan itu diuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan

E. Analisa terhadap Pernikahan dibawah Umur (Pernikahan Dini)

Menurut penulis pernikahan dini (pernikahan dibawah umur) yang masih banyak terjadi di bebarapa wilayah di Indonesia ini karena adanya beberapa factor diantaranya, factor pendidikan, ekonomi, dan budaya. Terlepas dari itu semua bahwasannya pernikahan yang dilakukan dibawah umur tentunya menimbulkan banyak mudharat yang terjadi dalam rumah tangga. Undang-Undang menetapkan usia minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki karena pada usia tersebut seseorang sudah dianggap cukup untuk membina sebuah rumah tangga. Selain itu, menikah mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban ini hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan baik jika suami-istri masing-masing sudah dewasa dan memiliki kesanggupan. Sedang anak-anak, bagaimana ia dapat memikul tanggung-jawab ini, sedang mengurus diri sendiri saja ia masih banyak menggantungkan orang tua atau walinya. Di samping itu, pernikahan memerlukan persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak, bagaimana mungkin mereka yang masih anak-anak dimintai persetujuan dan keridhaannya, kecuali dalam hal ini terjadi 'pemaksaan' dari orang tuanya atau walinya. Sulit dipahami dan dibayangkan sebuah peristiwa hukum yang amat penting ditentukan secara sepihak oleh wali atau orang tua, sementara yang mau menjalani masih anak-anak yang belum tahu apa arti dan konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum bernama pernikahan. Oleh sebab itu tunda pernikahan dini, persiapkan dulu hal-hal yang mendukung kemudahan dan kelancaran dalam berumah tangga dengan belajar, berilmu, berkarya, bekerja dan berbuat yang tepat dan pas guna menyiapkan masa depan yang lebih cerah.

Pernikahan dini pada umumnya akan banyak menimbulkan mudharat atau dampak negative, yang terjadi oleh perempuan. Siti Musdah Mulia dan

kawan-kawan menyampaikan beberapa sisi negatif dari pernikahan dini sebagai berikut :

1. Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
2. Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
5. Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
6. Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah.¹¹

Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia juga memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Menurut Ratnariani dalam *Waspada Online* menyatakan, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian laporan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus, dan penelitian yang dilakukan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) yakni:

- a. Pandangan “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- b. Kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.

¹¹ Siti Musdah Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003), hlm. 79-80.

- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- d. Korban pernikahan dini lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran UU perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Selain dampak negatif sebagaimana yang telah diungkapkan tersebut terdapat pula dampak positif yang dapat diperoleh dari pernikahan dini ini, dengan catatan manfaat/nilai positif ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas menikah untuk ibadah, diantara manfaat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menghindarkan pelakunya dari penyimpangan sexual. dengan menikah akan dapat menundukkan pandangan mata, dengan demikian seorang yang telah menikah akan terhindar dari gejala nafsu syahwat, mudah memelihara kehormatan, tidak terjatuh kedalam kubangan dosa yang keji. sebab penyimpangan sexual (penyalura sexual yang tidak halal) akan menyebabkan berbagai kerusakan, baik individual maupun sosial. penyimpangan tersebut adalah zina, homoseksual, lesbian, onani atau masturbasi. dengan demikian menikah merupakan sarana penting untuk memadamkan gejala syahwat, sebab jika syahwat manusia telah bergejolak dan tidak menemukan pelampiasannya yang halal, maka gejala syahwat itu akan mencari pelampiasannya yang haram dengan berbagai macam perbuatan maksiat.
- b. sehat fisik maupun psikis. berbagai survei menunjukkan, mereka yang telah menikah lebih kebal dari penyakit dibanding yang belum nikh. bahkan mereka yang telah melangsungkan pernikahan jika sakit akan cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan. dari sisi mental atau rohani, yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan nafsu seksnya. hal ini sesuai dengan hadits nabi bahwa menikah itu akan memelihara pandangan dan faraj. ditambah lagi jika pasangan tersebut telah memiliki anak, kebahagiaan suami isteri itu lebih besar lagi.
- c. mempercepat memiliki keturunan. salah satu tujuan dari nikah adalah memperoleh keturunan, dengan melakukan pernikahan dini dimungkinkan untuk mempercepat mendapatkan keturunan.

bagi seorang isteri, dalam rentang waktu usia 20-25 tahun akan memiliki waktu subur yang lebih panjang dibandingkan wanita yang menikah diatas umur 30an. dengan masa subur yang lebih panjang diharapkan akan mendapatkan keturunan yang banyak.

- d. lebih banyak nilai ibadah. dengan menikah dini akan lebih cepat mendapatkan nilai-nilai ibadah dibandingkan dengan menunda pernikahan. karena dalam islam sebuah rumah tangga memiliki lahan amal yang banyak. bagi suami menghidupi anak isteri, memberikan nafkah bathin adalah perbuatan yang mulia, bahkan dikategorikan sebagai jihad. begitu juga isteri dalam menyediakan makanan bagi suami, menyambut kedatangannya setelah pulang kerja serta mendidik anak-anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.
- e. lebih cepat dewasa. menikah dini akan mempercepat seseorang mencapai kedewasan. hal ini didasarkan realitas sosial yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan sebuah rumah tangga terdapat banyak halangan dan rintangan. halangan dan rintangan itu jika direnungi memberikan pendidikan mental yang baik. mereka yang sering diterpa berbagai kesulitan akan mudah memahami hidup. karena itu rumah tangga lebih cepat mendewasakan seseorang.
- f. bermanfaat untuk pendidikan anak. suami isteri yang menikah di usia muda adalah lebih sehat, lebih kuat dan lebih subur ketika mereka memasuki umur 40 tahun, dimana saat itu pendidikan anak sangat membutuhkan. lebih dari itu perbedaan tipis antara umur kedua orang tua dengan anak-anaknya akan memudahkan kedua orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya, dan mudah bagi orang tua untuk mengetahui tabi'at dan perilaku anak-anak mereka, yang mana hal ini merupakan unsur penting diantara unsur-unsur pendidikan.

jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini, antara lain; menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual, sehat fisik maupun psikis, mempercepat memiliki keturunan, lebih banyak nilai ibadah, lebih cepat dewasa, serta bermanfaat untuk pendidikan anak

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pernikahan dibawah umur maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.

Realitas pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat kita masih terdapat pro dan kontra dalam masyarakat, sebhagian masyarakat memandang pernikahan dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Diantara mudharat dari pernikahan dini ini ialah: tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita), dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, buruknya kesehatan ibu dan anak karena factor gizi ibu kurang terpenuhi, timbulnya salah satu factor penyebab tindakan kekerasan terhadap isteri hal ini terjadi karena factor berfikir yang belum matang serta masih banyak lagi mudharat yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur ini.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, Beirut : Dar al-Fikr, 1989

Fauzhil Azhim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Prees

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2002)

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Prees, 1994

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademik Pressindo, 2007.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Rajawali Press, 1995

Musdah Mulia, siti, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender LKAJ 2003

Rahayu Hadiotomo, Sri, *Psikologi Berkembang dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989

Subhan Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta, el-Kahfi, 2008

Shahih Bukhari jilid IV kitab “Manaqib Anshar, Bab Perkawinan no 3896

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak